



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Rizki Mona Syawlia

Analisis Legislatif Ahli Pertama

rizki.syawlia@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kondisi hutan Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang kompleks, ditandai oleh meningkatnya tekanan terhadap ekosistem serta kebutuhan mendesak akan tata kelola yang lebih adil serta berkelanjutan. Meskipun masih memiliki kawasan hutan tropis yang luas, degradasi dan alih fungsi lahan terus berlangsung akibat ekspansi komoditas, kebakaran hutan, dan lemahnya perlindungan terhadap wilayah adat. Pemerintah mencatat sekitar 12,7 juta hektare hutan perlu direhabilitasi, menegaskan besarnya tantangan dalam menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitarnya. Situasi ini menuntut pendekatan baru dan strategi yang lebih holistik guna mencegah kerusakan makin meluas.

Dalam forum global seperti COP30 di Belém, Brasil, pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa hutan merupakan pilar utama kontribusi nasional dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah menekankan bahwa keberlanjutan hutan tropis memerlukan perpaduan upaya konservasi, pembenahan tata kelola, penguatan komunitas adat, serta pengembangan ekonomi hijau. Penerapan agroforestri regeneratif—yang mengintegrasikan pohon kayu dengan komoditas bernilai ekonomi seperti kopi, kakao, dan pala—dinilai mampu memulihkan ekosistem sekaligus meningkatkan mata pencarian masyarakat. Negara seperti Brasil dan Tiongkok juga menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi lintas kawasan tropis, terutama dalam mewujudkan rantai pasok global bebas deforestasi.

Tata kelola kehutanan juga mengalami pembaruan melalui penyusunan regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Pemerintah menyiapkan revisi sejumlah aturan terkait zonasi, perhutanan sosial, sampai pemanfaatan jasa lingkungan untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia berjalan transparan, kredibel, dan inklusif. Pada saat yang sama, modernisasi pengelolaan kawasan konservasi terus didorong melalui digitalisasi sistem pemantauan di 57 taman nasional, serta inisiatif restorasi berskala besar, seperti kemitraan di Taman Nasional Way Kambas dan program konservasi gajah di Aceh. Melalui pengembangan Multi Usaha Kehutanan, masyarakat lokal dan pemegang izin didorong untuk mendiversifikasi usaha nonkayu guna mengurangi ketergantungan pada penebangan. Semua langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia tengah memasuki fase penting transisi menuju tata kelola hutan yang lebih adaptif, produktif, dan berkeadilan.

Kerusakan hutan di Indonesia menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang serius, sehingga rehabilitasi menjadi kebutuhan mendesak. Pemulihan hutan bukan hanya restorasi lingkungan, tetapi investasi jangka panjang bagi stabilitas iklim, ketahanan pangan, kualitas air, serta ekonomi pedesaan. Hutan yang pulih membantu menekan risiko banjir dan kekeringan, menjaga produktivitas lahan, dan membuka peluang ekonomi hijau termasuk pasar karbon nasional. Tanpa rehabilitasi yang inklusif, tekanan terhadap masyarakat adat, petani kecil, dan wilayah rentan akan meningkat serta menghambat pencapaian target iklim global. Guna mempercepat rehabilitasi 12,7 juta hektare hutan, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan ekologi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Pertama,*

diperlukan konsolidasi data biofisik dan sosial melalui pemetaan satu peta serta sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat dan transparan. *Kedua*, pengembangan model agroforestri regeneratif yang adaptif terhadap kondisi lokal, termasuk penyediaan bibit unggul, pendampingan teknis, dan paket insentif bagi kelompok masyarakat adat dan perhutanan sosial. *Ketiga*, harmonisasi regulasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong integrasi restorasi lahan dengan pasar karbon, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan program ekonomi produktif desa. *Keempat*, penguatan akses pembiayaan melalui skema hibah, kredit berbunga rendah, dan kemitraan investasi yang berkeadilan agar masyarakat berkembang tanpa menambah beban ekonomi. *Kelima*, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan mekanisme bagi hasil yang transparan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang serta pemerataan manfaat dari upaya rehabilitasi nasional.

Atensi DPR

Rehabilitasi 12,7 juta hektare hutan merupakan agenda strategis yang tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Namun, upaya ini menghadapi tantangan seperti ketidakpastian data tutupan lahan, lemahnya kelembagaan komunitas, dan minimnya pembiayaan perhutanan sosial. DPR RI, melalui Komisi IV, berperan dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif, inklusif, dan berkeadilan. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI perlu memastikan Kementerian Kehutanan dan yang terkait untuk melaksanakan rehabilitasi secara transparan, termasuk penyediaan bibit berkualitas, penerapan agroforestri regeneratif sesuai kondisi lokal, serta percepatan pengakuan hutan adat. Pengawasan juga harus mencakup regulasi turunan nilai ekonomi karbon agar manfaat pasar karbon dirasakan masyarakat yang menjaga hutan. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI diharapkan mendorong pendanaan yang memadai untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dan perhutanan sosial, serta membangun infrastruktur pendukung, seperti pusat pembibitan, unit pengolahan hasil hutan bukan kayu, dan fasilitas pemantauan berbasis teknologi. Dukungan kebijakan yang konsisten akan memperkuat rehabilitasi hutan pemulihan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber

kompas.com, 21 November 2025;
mediaindonesia.com, 11 November 2025;
merdeka.com, 21 November 2025; dan
tempo.co, 23 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R
Anugrah Juwita S

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*